

PERANAN PENDIDIKAN TINGGI DI MASYARAKAT DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN LANGKAH YANG HARUS DILAKSANAKAN DALAM MENGANTISIPASI PERUBAHAN MASYARAKAT MASA DEPAN

Heriyanta Budi Utama
STIE "AUB" Surakarta

Abstraksi

Budaya perguruan tinggi didasarkan pada keterbukaan, maka dunia Akademika ada kebebasan dan keterbukaan sehingga Perguruan Tinggi merupakan sumber ide bagi peningkatan hidup dan makna kehidupan manusia.

Sebuah Perguruan Tinggi dapat berfungsi sebagai unsur pembangunan dengan berpijak pada budaya keterbukaan kampus, dan hal ini dapat ditingkatkan apabila syarat suatu perguruan tinggi sudah dipenuhi antara lain; prasarana kampus yang memadai, peralatan laboratorium, perpustakaan yang berfungsi dan Dosen yang mempunyai dedikasi dengan kemampuan profesional yang tinggi serta kualifikasi yang memadai.

Budaya kampus yang terbuka menuntut kemampuan yang berfungsi sebagai proses globalisasi kehidupan manusia serta demokratisasi kehidupan dewasa ini. Daya dukung perguruan tinggi bagi pembangunan yang akan datang ditentukan oleh kemampuan lembaga itu untuk memberi jawaban yang tepat terhadap fakta sosial masyarakat industri masa depan.

Kata Kunci : Dunia akademika, proses globalisasi

A. PENDAHULUAN

Uraian dalam tulisan ini membahas mengenai masa depan suatu masyarakat, dalam hal ini masyarakat dan bangsa Indonesia dan mengenai peranan pendidikan tinggi dalam masa depan tersebut. Berbicara mengenai masa depan masyarakat Indonesia, kita telah mencapai konsensus bahwa masyarakat masa depan adalah masyarakat yang menuju suatu masyarakat industri dengan nilai-nilainya yang intrinsik, masyarakat kita merupakan suatu masyarakat transisional, suatu masyarakat yang bergerak. Gerakan masyarakat yang terjadi akan menyebabkan perubahan-perubahan struktural dalam tata kehidupan ekonomi dan sosial, juga perubahan-perubahan fungsional dari lembaga sosial yang ada. Penyesuaian-penyesuaian diperlukan dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Salah satu nilai yang semakin menonjol dalam kehidupan masa depan ialah "keterbukaan". Nilai keterbukaan sebenarnya tidak lain dari sikap rasional seseorang atau kelompok masyarakat atau bangsa dalam menata kehidupannya. Sikap

rasional atau rasionalisme tidak identik dengan sikap rasionalistik yang mengagamakan rasio. Sikap rasional merupakan kejernihan berpikir yang logis dan multidimensional.

Dalam sejarah pendidikan umat manusia, baik dalam tata kehidupan kebudayaan barat maupun timur, pengembangan sikap rasional merupakan bintang penunjuk arah dalam kehidupan akademik. Namun demikian berbagai penekanan kerap kali muncul dan diikuti oleh suatu polarisasi pemikiran yang ekstrem dan pada akhirnya berakibat kekalahan sendiri dari sikap rasional itu sendiri dan kembali kepada bentuk irasionalisme, yaitu berpikir yang tidak rasional, yang simplistik dan linier, sebagaimana berbagai bentuk ekstrem lainnya.

Dalam kerangka perkembangan berpikir manusia tersebut di atas, jelas betapa besar peranan dunia akademik atau universitas. Memang dalam sejarah kehidupan manusia, dunia universitas tidak jarang ditindas atau hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan yang berlaku. Namun sejarah pula kerap kali menunjukkan

peranan dunia akademik atau keluaran (output) dari lembaga akademik menjadi pendorong bagi perubahan-perubahan besar dalam kehidupan umat manusia.

Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional kita yang hampir seperempat abad itu peranan yang cukup besar telah diberikan pada dunia akademik. Bukan merupakan rahasia bahwa para pemikir dan penggerak dari rencana pembangunan nasional kita adalah orang-orang kampus. Rasionalisme kampus telah memberi berbagai inspirasi dalam pembangunan serta penerapan program pembangunan nasional meskipun tentunya bukan tanpa cacat. Yang penting dalam pengembangan sikap rasionalisme itu ialah adanya keterbukaan antara pemikir dan pelaksana. Ketertutupan akan melahirkan kecongkakan akademik maupun sikap anti rasionalisme.

Makalah ini berjudul *“Peranan pendidikan tinggi di masyarakat dalam sistem pendidikan nasional dan langkah yang harus dilaksanakan dalam mengantisipasi perubahan masyarakat masa depan”*.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dalam makalah ini akan kita kemukakan permasalahan yang terdiri dari tiga persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia di masa depan dalam hubungannya dengan pendidikan nasional yaitu :

1. Bagaimana dinamika perubahan masyarakat masa depan, peranan Perguruan Tinggi dan para aktor pembangunan.
2. Bagaimana sistem pendidikan nasional seharusnya di masa depan.
3. Langkah apa yang harus dilaksanakan untuk mengantisipasi perubahan masyarakat masa depan.

C. PEMBAHASAN MASALAH

DINAMIKA MASYARAKAT MASA DEPAN

Masyarakat kita akan menuju ke arah masyarakat industri. Masyarakat industri adalah masyarakat terbuka. Keterbukaan itu ditunjang oleh kemajuan iptek dan kemudahan-kemudahan komunikasi yang dilahirkannya. Keterbukaan masyarakat

merupakan suatu proses yang tidak dapat dibendung sejalan dengan menderunya proses demokrasi yang melanda kehidupan manusia dewasa ini. Kita lihat benteng-benteng otokrasi rontok satu per satu diterjang oleh hasrat manusia untuk mewujudkan salah satu hakikat kemanusiaannya: demokrasi. Cepat atau lambat, proses ini akan muncul dan terus berlangsung. Tempo serta intensitas proses demokrasi itu dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kehidupan politik bangsa yang menjamin keterbukaan seperti yang diisyaratkan dalam UU Dasar 1945.

Wahana yang disediakan dalam UUD itu hanya dapat berfungsi apabila manusia Indonesia itu cukup cerdas. Tanpa kecerdasan tidak mungkin ia mengadakan refleksi, menganalisis data, berpikir logis dan sistematis, serta dapat mengantisipasi kehidupan masa depan yang lebih baik. Dengan kecerdasan yang memadai ia dapat meluaskan wawasannya dan menentukan serta mempersiapkan partisipasinya dalam pembangunan masyarakat dan bangsanya. Keterbukaan dan kecerdasan merupakan dua sisi dari kebebasan manusia. Manusia yang bebas adalah manusia yang terbuka. Ia terbuka untuk berdialog dengan sesama, dan ia terbuka untuk dirinya sendiri.

Karena itu, seorang yang bebas adalah seseorang yang berani berintrospeksi untuk melihat kelebihan maupun kekurangan dirinya. Demikian pula karena ia menyadari akan kekurangannya, ia terbuka untuk ide yang baru dari orang lain atau dari lingkungannya. Keterbukaan terhadap dunia luar keterlibatan yang intelegen. Ia harus dapat memilih secara cepat dan tepat. Untuk dapat bertindak demikian ia harus cerdas.

Dunia masa depan merupakan dunia yang cepat berubah. Agar dapat memanfaatkan dinamika perubahan itu diperlukan kemampuan persepsi yang cepat terhadap perubahan, mampu menganalisisnya demi keuntungan memperkaya kepribadian agar tidak hanyut dalam arus perubahan itu. Disinilah penting adanya suatu tumpukan pijakan yang kuat bagi seseorang. Pijakan itu tidak lain dari budaya

Indonesia dalam arti yang luas yang mendasari upaya orientasi atau wawasan setiap orang Indonesia. Dalam kamus politik, wawasan tersebut tidak lain dari ketahanan budaya dari manusia Indonesia. Keberadaan ketahanan budaya bukan berarti sikap konservatisme, tetapi sebagai bahan referensi bagi suatu proses evaluatif yang dinamis.

Dalam kaitan dengan keterbukaan suatu masyarakat demokratis dalam rangka ketahanan budaya yang merupakan suatu mekanisme kontrol, keterbukaan disini bukan berarti ketelanjangan.

Ketelanjangan adalah bebas nilai, sedangkan keterbukaan adalah sarat nilai. Ketelanjangan berarti bebas dari nilai menghargai keberadaan orang lain, tidak ada tenggang rasa dan musyawarah untuk mufakat. Sebaliknya keterbukaan mengimplikasikan sikap peduli (*concern*) terhadap sesama untuk kesejahteraan bersama. Sikap peduli terhadap sesama bukan berarti sikap toleransi yang pasif. Justru sebaliknya, sikap peduli akan mengharamkan segala yang merugikan kepentingan bersama. Pada hakikatnya sikap peduli adalah dialog, menghargai kemitraan dan kebebasan penuh makna dari sesama kita.

Salah satu ekspresi dari keterbukaan ialah demokrasi ekonomi yang diminta oleh UUD 1945. Dalam sistem ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi yang mensyaratkan partisipasi penuh dari masyarakat. Partisipasi masyarakat berarti pengambilan keputusan yang mandiri oleh sikap anggota masyarakat. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka atau transparan, artinya mekanisme pasar dan kebijaksanaan ekonomi berlangsung secara jelas, dan diawasi oleh seluruh masyarakat. Partisipasi yang luas dari masyarakat tidak terlepas dari kehidupan politik rakyat yang berdasarkan Pancasila. Nilai-nilai kehidupan politik dan ekonomi yang demokratis ini perlu dikembangkan pada setiap insan Indonesia sejak dini. Dengan kata lain, hidup berkembangnya asas demokrasi dalam masyarakat Indonesia bergantung pada taraf kecer-

dasan rakyatnya atau pada kualitas pendidikannya. Visi dasri para peletak dasar negara kita memang sangat jauh ke depan apabila mereka merumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa salah satu tujuan membentuk negara ini ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

PERANAN DUNIA PENDIDIKAN TINGGI

Dalam sejarah peradaban umat manusia, dunia akademik selalu memainkan peranan sentral, apakah sebagai konservator nilai-nilai dominan yang berlaku atautkah sebagai sumber nilai-nilai baru bagi dinamika masyarakat. Ada masanya dunia akademik dijadikan konservator nilai-nilai tertentu dari suatu sistem kekuasaan atau diperalat oleh suatu sistem kekuasaan. Ada pula masanya dunia akademik menjadi mata air perubahan sosial. Dari kedua situasi tersebut tersirat hakikat paling dalm dari dunia akademik ialah adanya kebebasan atau keterbukaan berpikir. Apabila dalam situasi pertama dunia akademik sengaja dibuat bungkam dan secara sadar digunakan untuk menindas kemerdekaan berpikir, maka dalam situasi kedua dunia akademik memainkan peranannya yang orisinal yaitu sebagai sumber ide bagi peningkatan hidup dan makna kehidupan manusia.

Dunia akademik mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menumbuh kembangkan kehidupan demokrasi atau keterbukaan. Budaya kampus memang didasarkan kepada keterbukaan apa yang disebut kebebasan mimbar dan kebebasan mimbar akademik ialah kepedulian terhadap fakta kehidupan serta keinginan untuk menatanya dengan lebih baik. Sikap kepedulian serta penataan fakta-fakta kehidupan tentunya memerlukan berbagai syarat pendukung yaitu penguasaan sikap ilmiah, penguasaan metodologi ilmiah, sistem referal yang memungkinkan akumulasi data serta hasil analisis yang semakin meningkat kualitasnya. Tidak kurang pentingnya pula kegiatan tersebut terlaksana dalam situasi kondusif yang mendorong lahirnya sikap ingin tahu, ingin mencapai yang lebih

sempurna dan sistem insentif yang mendorong ke arah itu.

Akhir-akhir ini terdengar keinginan beberapa lembaga pendidikan tinggi kita ke arah "*research university*". Ide ini memang punya dasar. Lembaga pendidikan tinggi dalam proses globalisasi dewasa ini dimana persaingan semakin tajam serta kualitas produksi termasuk produksi lembaga pendidikan tinggi semakin menjadi tuntutan, memang di masa depan eksistensi lembaga pendidikan tinggi akan ditentukan oleh kemampuan risetnya. Dewasa ini memang pembangunan pendidikan tinggi masih diarahkan pada suatu peningkatan sarana dan mutu ke arah pemerataan pengembangan terutama pada perguruan tinggi di daerah. Dalam memasuki era industrialisasi, kemampuan yang telah dibina untuk semua perguruan tinggi (pemerintah), mulai diarahkan kepada pengembangan kemampuan riset dari masing-masing lembaga pendidikan pada bidang-bidang yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Bagaimana fungsi dunia akademik sebagai salah satu unsur penggerak pembangunan nasional dengan berpijak pada budaya keterbukaan kampus. Pendidikan tinggi tidak dapat hanya menjadi penonton atau mungkin sebagai peneritik kejadian-kejadian sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Memang, perguruan tinggi tidak lagi berdiri di atas menara gading atau menara batu di atas masyarakat. Perguruan tinggi adalah sebagian dari gerakan pembangunan nasional.

Kemampuan untuk mau dan dapat melihat fakta dan realita gejala-gejala sosial masih merupakan tugas yang berat bagi kebanyakan perguruan tinggi kita. Kemampuan ini hanya dapat ditingkatkan apabila syarat-syarat minimal suatu perguruan tinggi sudah dipenuhi antara lain prasarana kampus yang memadai, peralatan laboratorium, perpustakaan yang berfungsi, dan armada dosen yang siap tempur artinya yang punya dedikasi dengan kemampuan profesional yang tinggi. Erat kaitannya dengan meningkatkan kemauan

dan kemampuan lembaga pendidikan tinggi untuk melihat fakta sosial ialah tumbuhnya suatu budaya kampus juga meminta perubahan citra dari masya-rakat dan para mahasiswa mengenai kehidupan akademik. Kehidupan akademik meminta kemampuan intelektual tertentu yaitu daya analisis, kritis dan konstruktif. Kehidupan akademik atau budaya kampus kita dewasa ini masih merupakan kelanjutan budaya sekolah lanjutan yaitu menghabiskan suatu porsi tertentu dari menu yang sudah ditentukan. Budaya kampus sebaliknya membuat orang selalu lapar karena menu yang harus disusun sendiri oleh para penghuni dan pengasuh kampus. Dalam budaya kampus ditumbuhkan kemampuan dan keinginan untuk mencari dan menginterpretasikan faktor dan data dalam suatu konteks yang baru secara terus menerus karena setiap entri data baru akan merubah seluruh konteks yang ada sehingga memerlukan interpretasi yang baru pula.

Budaya kampus yang terbuka menuntut kemampuan-kemampuan yang berfungsi sebagai proses globalisasi kehidupan manusia serta demokratisasi kehidupan dewasa ini. Daya dukung perguruan tinggi bagi pembangunan yang akan datang akan ditentukan oleh kemampuan lembaga itu untuk memberi jawaban yang tepat terhadap fakta sosial masyarakat industri masa depan.

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL YANG MENUNJANG MASYARAKAT MASA DEPAN

Sistem pendidikan nasional dan krisis yang dialaminya dewasa ini serta beberapa proses pemecahannya ke arah terwujudnya suatu sistem yang mantap dan berkesinambungan. Sistem pendidikan yang sehat itu sendiri akan terus bergerak sesuai dengan gerak perubahan masya-rakat.

Pemikiran tersebut ini mencoba merekonstruksi SISDIKNAS yang akan menunjang masyarakat industri modern, suatu yang diharamkan untuk tidak dapat diterima karena masyarakat industri modern telah merupakan tekad bangsa kita untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia. Apa yang akan

disajikan meliputi berbagai aspek SISDIKNAS yang dianggap penulis sebagai kecenderungan SISDIKNAS dalam masyarakat industri modern di Indonesia di masa depan. Ada delapan aspek yang harus diperhatikan yaitu :

1. Pendidikan Dasar

Sistem Pendidikan Nasional tentang pendidikan dasar 9 tahun mungkin akan menjadi kenyataan sebagai syarat wajib belajar dalam pada akhir pembangunan jangka panjang, pendidikan universal pada tingkat pendidikan menengah sudah dapat diterapkan. Inilah dasar pendidikan yang dianggap cukup kokoh untuk menunjang masyarakat industri modern dan masyarakat informasi.

Yang lebih penting dalam peningkatan pendidikan dasar untuk warga masyarakat industri ialah lahirnya kepatuhan terhadap norma-norma sosial baru seperti ketertiban, disiplin dalam tata kehidupan bersama, kebiasaan-kebiasaan hidup dan tentunya moral yang tinggi.

Terciptanya kehidupan sosial yang teratur itu perlu terus menerus ditanyakan melalui pendidikan. Dalam kehidupan di sekolah selain pendidikan moral, sekolah itu sendiri menjadi laboratorium etik dan moral dari peserta didik. Ini artinya sekolah dalam masyarakat industri modern adalah sekolah yang berdisiplin. Tentunya jenis disiplin yang diinginkan adalah disiplin yang muncul dari kesadaran diri, yang terpupuk melalui kebiasaan yang baik serta kepatuhan terhadap tujuan bersama. Dalam kaitan dengan pemupukan tingkah laku sosial yang baik perlu dikembalikan pengaruh dan peranan keluarga dalam pendidikan etik dan moral. Peralihan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri terdapat kecenderungan lepasnya tanggung jawab keluarga terhadap pendidikan etik dan moral karena hubungan interpersonal cenderung merenggang.

Sebagai jenjang pendidikan yang minimal wajib dipunyai oleh setiap

warganegara, misi, isi dan harkat pendidikan dasar harus menempati prioritas tertinggi dalam SISDIKNAS. Dalam masyarakat industri modern pendidikan dasar adalah suatu industri-strategis dasar yang mengembangkan sumber manusia yang diperlukan dalam pembangunan masyarakat industri itu sendiri. Kecenderungan negara berkembang untuk memprioritaskan pendidikan tinggi memang dapat dimengerti karena dorongan masyarakat sendiri baik disebabkan oleh prestise sosial maupun desakan politik, maupun bias dari para perencana yang kebanyakan berasal dari dunia universitas, perlu disesuaikan dengan tuntutan masyarakat industri.

2. Kurikulum

Kurikulum adalah sarana dari suatu sistem pendidikan. Masyarakat industri modern adalah masyarakat yang hidup dan dihidupi oleh sains dan teknologi. Oleh sebab itu, pelajaran sains dan teknologi menempati prioritas tinggi dan kurikulum, terutama pendidikan dasar. Seperti yang telah diuraikan, masyarakat industri bukan hanya melek huruf, juga melek numerik dan melek sains.

Menghadapi dunia yang semakin mengecil, pendidikan bahasa asing yaitu bahasa Inggris, Cina dan Jepang telah merupakan keharusan. Tentunya tanpa mengurangi perhatian kita terhadap bahasa nasional serta bahasa daerah yang hidup beserta kebudayaannya, dalam rangka pengembangan ketahanan budaya dan ketahanan nasional. Pendidikan bahasa, termasuk bahasa asing, serta pendidikan budaya nasional akan mendapat porsi yang besar.

Melihat keragaman potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam serta kebhinekaan bangsa kita, kurikulum yang uniform akan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fleksibilitas kurikulum, dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi

merupakan suatu tuntutan. Pada pendidikan dasar tentu ada kurikulum inti demi untuk memupuk kesatuan dan persatuan bangsa dan memperkuat ketahanan nasional, begitu pula pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Otonomi pendidikan tinggi yang sudah kita mulai sekarang akan marak dalam masyarakat industri.

Suatu hal yang perlu diperhatikan ialah beban kurikulum sekolah kita terkenal sangat erat dengan berbagai macam mata pelajaran sehingga sangat mendera peserta didik. Dalam era informasi hal ini sangat menjadi berlebihan.

Sebelumnya telah disinggung mengenai pentingnya pendidikan moral dan agama dalam masyarakat industri modern. Masyarakat industri modern membawa serta nilai-nilai baru yang bukan tidak mungkin dapat menggoyahkan kesadaran moral dan agama kita sebagaimana dialami oleh negara industri modern dewasa ini. Oleh sebab itu, dalam kurikulum hal ini perlu mendapat tempat yang wajar.

3. Proses belajar-mengajar

Masyarakat industri modern adalah masyarakat terbuka, rasional dan kritis. Sejalan dengan itu masyarakat itu hidup dalam era reformasi. Sudah tentu cara-cara belajar-mengajar yang indoktriner dan menghafal tidak pada tempatnya lagi. Yang perlu dikuasai peserta didik adalah informasi yang telah diolah sendiri atau belajar mandiri. Dengan sendirinya cara-cara menghafal di luar kepala sudah tidak pada tempatnya lagi, peserta didik harus dapat mencari sendiri informasi yang diperlukan dengan tuntunan guru bila diperlukan. Belajar mencari sendiri atau belajar mandiri, harus menggantikan menghafal secara membuta. Tentunya proses belajar mengajar agar peserta didik belajar mencari sendiri dibantu dengan fasilitas belajar yang memadai, ditopang oleh adanya sumber-sumber belajar seperti perpustakaan yang

lengkap, laboratorium serta bengkel-bengkel kerja, serta dapat menggunakan teknologi informasi, komputer dan teknologi canggih lainnya dalam membantu proses belajar mengajar akan menjadi kenyataan.

Berkaitan hal tersebut perlu dijelaskan bahwa seseorang bisa mencari sendiri bukan berarti menjadi seorang individualis. Kemajuan ilmu pengetahuan telah merupakan hasil kerja sama dari bermacam kepakaran atau ahli. Oleh sebab itu, bekerjasama dalam belajar dan kemudian dalam penelitian merupakan suatu bentuk kelakuan yang perlu dikembangkan dan dipupuk. Belajar kelompok merupakan salah satu metode belajar-mengajar dalam masyarakat industri modern.

Sejalan dengan kemajuan teknologi serta era reformasi akan muncul suatu jaringan informasi yang bermanfaat untuk belajar seperti, perpustakaan elektronik dan bentuk-bentuk jaringan informasi canggih lainnya yang bakal lahir. Semua teknologi ini akan sangat bermanfaat dalam membantu proses belajar dan mengajar bahkan mungkin akan mengubah secara mendasar metodologi belajar mengajar yang kita kenal sekarang.

4. Tenaga Pendidik

Guru dalam masyarakat industri modern adalah seorang yang profesional karena ia mengemban misi suatu industri-strategi dasar. Guru dalam masyarakat menguasai sains dan teknologi, ia membawa peserta didik kepada pengenalan sains dan teknologi itu, dan lebih dari itu ia adalah sosok personifikasi dari moral dan agama. Inilah masyarakat Indonesia modern, seorang profesional, gabungan ciri-ciri seorang saintis, ulama dan mungkin juga seniman. Karakteristik guru seperti diatas tentu memerlukan program pendidikan yang sesuai. Guru dalam masyarakat industri modern harus mendapatkan pendidikan dasar sebagai seorang sarjana murni, ditambah

dengan kemampuan sebagai seorang guru.

Pendidikan guru sangat memeningkan program pelatihan pengayaan yang berkelanjutan sebagai program peningkatan profesi. Konsekuensi logis dari pendidikan profesional guru itu, dia berhak memperoleh penghargaan yang lebih baik, sehingga profesi guru itu akan menjadi menarik dan dapat menjaring putera-putera bangsa terbaik untuk mengabdikan profesi mulia itu. Guru adalah seorang profesional dan bukan hanya sekedar sebagai seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang tidak mempedulikan aspek ekonomis dari profesinya itu.

Dalam peningkatan kemampuan profesionalnya, guru yang saintis perlu dibekali dengan sekelompok kompetensi yang relevan dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta era informasi dalam mengantar peserta didik mengenal, mencari dan mencernakan informasi yang diperolehnya sendiri. Oleh sebab itu, program pengayaan berkelanjutan menjadi teramat penting dalam pembinaan karier guru.

Salah satu tuntutan dunia industri modern ialah adanya kesinambungan antara dunia pendidikan dan dunia industri, termasuk pendidikan universitas. Dalam kaitan ini harus ada kemungkinan universitas memperoleh tenaga dosen dari dunia industri atas dasar part-time, dan sebaliknya pada dosen diterima memasuki dunia industri pada waktu-waktu tertentu. Demikian pula dalam program penelitian di universitas, dibuka peluang-peluang penelitian bersama antara universitas dan dunia industri.

5. Pendidikan Tinggi

Di dalam masyarakat industri modern, pendidikan tinggi akan semakin otonom dalam arti mempunyai program pendidikan yang fleksibel sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Otonomi itu dapat berupa program akademik, rekrutmen tenaga

dosen dari masyarakat dan dunia industri maupun dari dunia internasional. Kriteria memasuki universitas ditentukan sendiri oleh masing-masing lembaga pendidikan tinggi. Dengan singkat, lembaga pendidikan tinggi akan semakin individualistik dalam arti yang positif, dan semakin terbuka terhadap masyarakat. Keterbukaan terhadap masyarakat disebabkan karena hubungan yang erat dengan dunia industri dan masyarakat sendiri, masyarakat menyisihkan dana untuk universitasnya dan sebaliknya universitas menyediakan program-program pendidikan berkelanjutan bagi masyarakatnya. Hal ini terutama berlaku bagi universitas-universitas daerah.

Perguruan tinggi dalam masyarakat industri modern adalah pula pusat pengembangan iptek. Di dalam kondisi itu sudah pada waktunya mengembangkan sejumlah universitas yang berperan sebagai universitas nasional dengan reputasi internasional dan nasional, serta merupakan pula arena pertemuan antarputera daerah dalam rangka mengokohkan persatuan dan kesatuan nasional.

Peranan pendidikan tinggi sebagai pusat penelitian dalam masyarakat industri modern memang sangat relevan karena spesialisnya itu serta dengan dukungan penuh dari dunia industri serta pusat-pusat penelitian yang lain. Universitas akan menjadi pusat dari berbagai kegiatan penelitian sehingga lembaga itu menjadi university, paguyuban para pakar yang meneliti jagad raya dengan segala isinya dan fenomenanya, termasuk pusat pengembangan seni dan budaya.

Dengan perguruan tinggi yang semakin individualistik itu, semakin menonjol pula peranan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) karena relatif mempunyai otonomi yang lebih fleksibel dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri (PTN). PTN mungkin akan mengkhususkan diri terutama untuk suplay tenaga dalam sektor peme-

rintah serta beberapa akan berfungsi sebagai universitas nasional, sedangkan PTS akan lebih ditujukan kepada supply berbagai tenaga ahli yang dibutuhkan dalam sektor swasta dan industri, dalam hubungan ini perguruan tinggi untuk ilmu pengetahuan dan teknologi informasi akan semakin menonjol.

Berkaitan dengan akan meningkatnya kebutuhan akan ilmu pengetahuan dan pengembangan pribadi serta ditunjang oleh teknologi komunikasi, Universitas Terbuka akan semakin relevan. Tentunya perlu ditemukan metodologi yang tepat dalam menyampaikan informasi dan keterampilan. Fungsinya akan berubah dari program-program mengejar ijazah kepada keinginan untuk memperkaya kepribadian.

6. Pendidikan Berkelanjutan

Suatu masyarakat industri modern dalam era reformasi merupakan suatu masyarakat yang terus menerus belajar, sebab kalau tidak demikian masyarakat itu akan ketinggalan dari kemajuan iptek yang sangat cepat perkembangannya. Seperti telah dikemukakan dimuka, sistem pendidikan formal menyediakan program bahkan waktu khusus bagi masyarakat untuk pendidikan berkelanjutan. Begitu pula kegiatan kurikuler di perguruan tinggi akan begitu fleksibel untuk menampung anggota masyarakat yang ingin menimba ilmu pengetahuan. Program-program ekstension akan sangat diperlukan karena disesuaikan dengan kebutuhan dan waktu anggota masyarakat yang bekerja, disamping adanya program belajar pada Universitas Terbuka serta kursus-kursus lainnya yang ditumpang oleh berbagai jaringan sistem informasi seperti perpustakaan-perpustakaan serta media massa cetak, elektronik maupun radio.

Yang akan menarik ialah kebutuhan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi para karyawan.

Biasanya mereka akan memperoleh pendidikan dan pelatihan lanjutan dalam perusahaan namun kesempatan itu akan dirasakan kurang memadai. Mereka memerlukan juga waktu-waktu khusus di luar masa kerja untuk memperoleh pendidikan tambahan. Hal ini merupakan hal baru dalam hubungan kerja masyarakat industri modern.

7. Pembiayaan Pendidikan

Pendidikan yang bermutu merupakan suatu investasi yang mahal. Masyarakat industri modern menyadari hal ini dan akan menanamkan investasi yang besar untuk industri pendidikan itu. Kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakikatnya akan memberikan suatu kekuatan masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Pembiayaan pendidikan yang cukup besar dalam masyarakat industri modern berasal dari orang tua, masyarakat dan dunia industri. Dari masyarakat dapat berupa sumbangan, begitu pula dari dunia industri misalnya untuk penelitian-penelitian. Orang tua akan menyadari dan menanggung biaya pendidikan (SPP) yang lebih riil, sedangkan dari sektor pemerintah kemungkinan melalui pajak pendidikan. Sudah tentu tidak semua orang tua akan mampu, terutama pada orang tua yang mendekati masa pensiun sedangkan biaya pendidikan anaknya justru semakin meningkat. Dalam hal ini melalui sistem perpajakan misalnya, beban orang tua akan dapat dikurangi. Demikian pula sistem beasiswa yang rasional dapat dikembangkan maupun kredit pendidikan.

Salah satu kegiatan pendidikan tinggi yang meminta banyak dana ialah kegiatan penelitian. Seperti yang telah diuraikan, dalam masyarakat industri dimungkinkan kegiatan penelitian bersama antara dunia universitas dan dunia industri, dan pusat-pusat pene-

litan saling menguntungkan karena terhindar dari tumpang tindih serta pemanfaatan dana penelitian secara optimal dan efisien.

8. Desentralisasi Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat

Pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat industri modern haruslah berakar dalam masyarakat setempat. Oleh sebab itu, sentralisasi cenderung mengasingkan pendidikan dari masyarakat. Dalam membicarakan kurikulum, pendidikan dan penelitian, peranan universitas, program pendidikan berkelanjutan, maupun pembiayaan pendidikan menuntut adanya desentralisasi. Dalam hal ini, provinsi merupakan satu kesatuan yang riil dalam menyusun program pendidikan dan pelatihan terpadu yang sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya alam dan manusia dalam daerah itu. Hal ini berarti bahwa semua jenjang dan jenis pendidikan dan pelatihan di provinsi itu berbeda dalam suatu manajemen. Tidak seperti keadaan dewasa ini masing-masing jenis dan jenjang pendidikan terkotak-kotak dan dikelola oleh berbagai instansi maupun departemen. Di dalam keadaan demikian tidak mungkin tercipta suatu sistem pendidikan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat yang riil. Dalam masyarakat industri modern terdapat artikulasi antarjenis dan jenjang pendidikan serta pelatihan, antara dunia kerja.

Sentralisasi pendidikan hanya pada hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan nasional seperti kebijakan mengenai bahasa nasional, sistem pendidikan, dan pada tingkat tertentu mengenai akreditasi, khususnya untuk pendidikan tinggi. Desentralisasi pendidikan berkenaan pula dengan upaya memberikan otonomi kepada daerah. Daerah tingkat II akan mempunyai tanggung jawab penuh untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah, sedangkan Daerah Tingkat II untuk

pendidikan tinggi serta mengkoordinasikan seluruh pendidikan dan pelatihan di daerah itu dalam suatu sistem yang terintegrasi sebagai sub sistem yang otonom dalam SISDIKNAS.

LANGKAH YANG HARUS DILAKSANAKAN DALAM MENGANTISIPASI PERUBAHAN MASA DEPAN

Langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam mengantisipasi perubahan di masa depan terdiri dari :

Pertama :

Poros pendidikan dengan dorongan yang sangat kuat dari sekolah dasar menuju pendidikan tinggi perlu diferensiasi, apabila tidak dikendalikan akan merupakan kekuatan yang merusak. Sistem pengendalian itu antara lain diferensiasi program pendidikan dan pelatihan kejuruan dan berbagai sektor pembangunan.

Kedua :

Pengarahan kepada pekerjaan sudah dimulai sejak dini. Sejak jenjang pendidikan dasar perlu ada pengarahan kepada motivasi cinta kerja dan informasi yang menarik mengenai dunia kerja. Program pendidikan non formal atau kerja atau usaha perlu diperbanyak dan dekat dengan konsumen 1.

Ketiga :

Sejalan dengan intervensi untuk mengubah ambisi para pemuda ke arah pekerjaan, dikembangkan sikap untuk mengisi sektor informal yang mempunyai kesempatan kerja yang cukup luas. Di dalam kaitan ini perlu koordinasi program pelatihan antar departemen : untuk menyusun program pelatihan terpadu. Program ini tentunya tidak dapat disusun terpusat dan seragam tetapi harus sesuai dengan kebutuhan yang nyata. Pengelolaan program pelatihan ini haruslah diberikan kepada daerah sesuai dengan otonomi daerah (Tingkat Dua).

Keempat :

Dengan filter-filter yang ada pada jenjang pendidikan sebelumnya. Mahasiswa yang matang secara intelektual adalah juga mahasiswa yang mempunyai kemampuan intelektual. Hal ini berarti bahwa mahasiswa pendidikan tinggi haruslah selektif, melalui penapisan-penapisan yang objektif. Dunia kampus adalah dunia ilmu pengetahuan dan riset yang meminta syarat-syarat yang ketat dalam hal kemampuan intelektual.

Kelima :

Pengembangan sistem pendidikan tinggi nasional perlu direstrukturisasi. Perestroika sistem pendidikan tinggi ini meliputi berbagai aspek, antara lain keseimbangan program studi, peningkatan mutu, dan hubungan antara PTN dan PTS. Seperti telah diuraikan, sistem pendidikan nasional kita sebenarnya belum memadai memproduksi tenaga-tenaga sarjana secara kuantitatif. Peranan PTS dalam kaitan ini akan sangat membantu, asal outpunya memperhitungkan program-program studi yang sangat diperlukan dalam pembangunan nasional. Khususnya program studi ilmu sosial dan keguruan perlu diatur agar output sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, mutu pendidikan terus ditingkatkan antara lain dengan meningkatkan kualitas tenaga dosen, sarana dan prasarana belajar yang memadai.

Selain kematangan intelektual, para mahasiswa memerlukan kemandirian dan motivasi. Mereka yang memperoleh privilese memasuki perguruan tinggi tahu benar untuk apa ia memasukinya. Ia mengetahui bahwa baik "*social cost*" maupun "*individual cost*" untuk memasuki lembaga pendidikan itu cukup tinggi. Baginya, ijazah perguruan tinggi bukanlah tujuan, tetapi semata-mata sebagai simbol formal atas keberhasilannya menyelesaikan pendidikan pada lembaga itu. Ada

sinyalemen banyak mahasiswa dewasa ini yang memasuki lembaga pendidikan tinggi hanya sekedar menghabiskan waktu atau karena belum berhasil memperoleh pekerjaan, atau sebab-sebab ekstrensik lainnya.

Keenam:

Perampingan perguruan tinggi bukan berarti menutup pintu bagi pemerataan. Banyak orang yang ingin melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi demi pengembangan pribadinya semata-mata atau ingin secepatnya menerapkan ilmu pengetahuannya atas kehidupannya. Dalam hal ini program-program non gelar atau program diploma perlu diperbanyak dan lebih berdiferensiasi. Perguruan tinggi haruslah pula menjadi pusat belajar berkelanjutan.

Ketujuh :

Pembangunan nasional kita harus merata di seluruh daerah nusantara. Apa yang terjadi dewasa ini, terdapat tenaga-tenaga lulusan perguruan tinggi yang tidak merata, baik dari jumlah maupun daam kualifikasinya. Hal ini disebabkan pendidikan tinggi kita dikelola terlalu sentralistik dengan program yang homogen. Dengan demikian peran dan fungsi pendidikan tinggi dengan pembangunan daerah boleh dikatakan sangat minim bahkan tidak ada. Programnya nyaris tidak mempunyai relevansi dengan kebutuhan tenaga tingkat tinggi yang diperlukan dalam pembangunan daerah. Yang banyak diperlukan adalah tenaga teknik dan tenaga ahli pertanian untuk pembangunan pedesaan, tetapi yang diwisuda kebanyakan ahli-ahli ilmu hukum, politik dan keguruan. Seharusnya pendidikan itu dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi dikelola secara terpadu di daerah, pertama-tama untuk memenuhi kebutuhan daerah, kemudian kebutuhan regional dan bahkan nasional akan tenaga lulusan pergu-

ruan tinggi. Pengelolaan terpadu tersebut bukan saja meliputi sistem pendidikan formal, juga program pelatihan. Artinya, di setiap daerah (Tingkat I) perlu disusun suatu program terpadu pendidikan dan pelatihan, termasuk program pendidikan non-formal.

KESIMPULAN

Dari permasalahan dan pembahasan masalah dapat kita simpulkan sebagai berikut :

- Masyarakat masa depan adalah masyarakat industri, terbuka, demokrasi dalam proses perubahan dunia yang sangat cepat.
- Budaya perguruan tinggi didasarkan pada keterbukaan maka dunia Akademi ada kebebasan dan keterbukaan sehingga Perguruan Tinggi merupakan sumber ide bagi peningkatan hidup dan makna kehidupan manusia.
- Sebuah Perguruan Tinggi dapat berfungsi sebagai unsur pembangunan dengan berpijak pada budaya keterbukaan kampus, dan hal ini dapat ditingkatkan apabila syarat suatu perguruan tinggi sudah dipenuhi antara lain prasarana kampus yang memadai, peralatan laboratorium, perpustakaan yang berfungsi dan Dosen yang mempunyai dedikasi dengan kemampuan profesional yang tinggi serta kualifikasi yang memadai.
- Budaya kampus yang terbuka menuntut kemampuan yang berfungsi sebagai proses globalisasi kehidupan manusia serta demokratisasi kehidupan dewasa ini. Daya dukung perguruan tinggi bagi pembangunan yang akan datang ditentukan oleh kemampuan lembaga itu untuk memberi jawaban yang tepat terhadap fakta sosial masyarakat industri masa depan.
- Sistem Pendidikan Nasional yang seharusnya di masa depan meliputi delapan aspek yaitu :
 1. Pendidikan Dasar

Sebagai jenjang pendidikan yang minimal wajib dipunyai oleh setiap warga negara, namun kecenderungan negara berkembang untuk memprioritaskan pendidikan tinggi perlu disesuaikan dengan masyarakat industri.

2. Kurikulum
Fleksibilitas kurikulum dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi merupakan suatu tuntutan, maka muncul pemikiran kurikulum berbasis masyarakat.
3. Proses belajar mengajar
Cara belajar mengajar yang indoktriner dan menghafal sudah tidak pada tempatnya khususnya di Perguruan Tinggi, tetapi peserta didik harus dapat mencari sendiri informasi yang diperlukan dengan tuntunan dosen.
4. Tenaga Pendidik
Mengingat Dosen sebagai penuntun dalam proses pembelajaran maka dituntut mempunyai kualifikasi tertentu secara formal maupun profesional misalkan dari jenjang pendidikannya Master bahkan Doktor. Pengalaman mengajar dan sebagainya.
5. Pendidikan Tinggi
Ada dua pengelolaan perguruan tinggi Pemerintah (PTN) dan Swasta (PTS) mempunyai peranan sebagai pusat penelitian dalam masyarakat industri modern, ber-kaitan dengan meningkatnya kebutuhan akan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Universitas terbuka akan relevan.
6. Pendidikan berkelanjutan
Suatu masyarakat industri modern dalam era reformasi merupakan suatu masyarakat yang terus menerus belajar, sebab kalau tidak masyarakat akan tertinggal dari kemajuan IPTEK yang sangat cepat perkembangannya secara global.
7. Pembiayaan Pendidikan
Pendidikan yang bermutu merupakan suatu investasi yang mahal

namun kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakekatnya akan memberikan suatu kekuatan masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pembiayaan berasal dari orang tua masyarakat dan dunia industri.

8. Desentralisasi pendidikan dan partisipasi masyarakat

Pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat industri modern haruslah berakar dari masyarakat setempat, provinsi merupakan suatu kesatuan riil dalam menyusun program pendidikan dan pelatihan terpadu yang sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya alam dan manusia di daerah itu, ini berarti bahwa semua jenjang dan jenis pendidikan dan pelatihan di provinsi dapat berbeda dalam rangka menyesuaikan kebutuhan masyarakat.

- Ada tujuh langkah yang harus dilaksanakan dalam mengantisipasi perubahan di masa depan yaitu :
 1. Perlu adanya pengendalian proses pendidikan nasional
 2. Pengarahan motivasi cinta kerja dan informasi yang menarik mengenai dunia kerja.
 3. Perlu koordinasi program pelatihan antar departemen, disesuaikan dengan kebutuhan nyata dan harus diberikan kepada otonomi daerah setempat.
 4. Mahasiswa pendidikan tinggi harus selektif, karena dunia kampus adalah dunia ilmu pengetahuan dan riset yang meminta syarat ketat dalam hal kemampuan intelektual.
 5. Pengembangan sistem pendidikan tinggi, melalui keseimbangan program

studi, peningkatan mutu perguruan tinggi baik PTN ataupun PTS.

6. Perlu diperbanyak program Non gelar sesuai kebutuhan permintaan tenaga kerja.
7. Pembangunan nasional harus merata di seluruh daerah Nusantara, baik jumlah maupun kwalifikasinya, sehingga mempunyai relevansi dengan kebutuhan tenaga kerja, berdasarkan analisa Supply dan Demand kebutuhan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Oetomo Jakob, Menuju Masyarakat Baru Indonesia, Antisipasi terhadap Tantangan Abad XXI, Gramedia, Jakarta, 1990.
- Soemitro, Desentralisasi dalam Pelaksanaan Manajemen Pembangunan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990.
- Tilar, H.A.R., Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Tilar, H.A.R. Pendidikan dalam Pembangunan Nasional Menyongsong Abad XXI, Balai Pustaka, Jakarta, 199

